

Aksi separatisme papua dan cara menanggulanginya

Miswah

Program studi Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: miswah997@gmail.com

Kata Kunci:

OPM (Organisasi Papua Merdeka);
KKB (Kelompok Kriminal
Bersenjata); Separatisme,
Pelanggaran HAM

Keywords:

Opm (Papua independent
organization); KKB (groups of
armed criminals); Mesmerism,
human rights violation.

ABSTRAK

Aksi separatisme dalam suatu kenegaraan memanglah sulit untuk dihindari, bahkan Indonesia sering kali mengalami aksi separatisme dari berbagai kelompok, suku bangsa maupun wilayah yang tercatat didalam sejarahnya, namun sudah banyak juga yang telah berhasil diatasi oleh pemerintah. Meskipun banyak yang telah berhasil diatasi oleh pemerintah, namun ada gerakan separatisme yang masih berlangsung hingga saat ini, yakni gerakan Papua merdeka yang dikenal dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan juga dikenal sebagai KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk meredam kemarahan suku Papua agar gerakan separatisme dapat dihentikan, namun sangat

disayangkan karena upaya pemerintah dalam menangani kasus ini dianggap kurang tepat karena banyak menimbulkan kasus pelanggaran HAM yang justru hal tersebut tidak akurat dalam menyelesaikan permasalahan separatisme tersebut. Beberapa faktor yang memicu timbulnya gerakan separatisme di Papua yang terus beroperasi hingga saat ini adalah faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga kesenjangan sosial, yang mana Papua merasa di anak tirikan atau dibedakan dari wilayah yang lain yang ada di Indonesia. Presiden Jokowi telah menindak lanjuti kasus separatisme dengan mengadakan agenda prioritas yang mana dalam agenda prioritas tersebut pemerintah membuat proyek pembangunan infrastruktur berupa jalan. Sehingga dapat membantu masyarakat Papua dengan adanya akses distribusi barang yang dapat menggerakkan roda aktivitas kemasyarakatan.

ABSTRACT

Governance in countries is difficult to avoid, even Indonesia often experiences divisiveness from groups, national and region recorded in its history, but many governments have been able to overcome it. Although much has been overcome by the government, there is an ongoing movement of the free Papua movement known as opm (the Papua independent organization) and also known as KKB (an armed criminal group). The government has made extensive efforts to quell the anger of the papuan people to stop the sectarians from addressing the case, but it is unfortunate that the government's attempts at handling the case were found to be incorrect because many of the human rights abuses that were not accurate in solving the problem of inequality. Some of the factors that have fueled the Papuan's continued mobility to this day are economic, educational, health and social inequality factors, which Papua feels in children's slight or differentiated from other regions in Indonesia. President Jokowi has been following up on cases of opportunism by providing a priority agenda on which the government plans to build infrastructure building projects on roads. So that it can help people with access to distribution of goods that move the akti wheel.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, beragam suku, budaya, dan agama. Dalam sejarahnya, Indonesia sering kali berhadapan dengan tantangan yang kerap kali



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berpotensi dapat memecah persatuan dan kesatuan. Termasuk diantara tantangan yang ada adalah gerakan separatisme. OPM (Organisasi Papua Merdeka) merupakan suatu organisasi yang berada dibawah pimpinan warga Papua Barat. OPM dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yakni untuk lembaga yang mewadahi warga Papua Barat dalam berjuang demi meraih kemerdekaan agar Irian Jaya terlepas dari wilayah Indonesia dan membentuk negara sendiri. Gerakan OPM ini dilahirkan dari kekecewaan penduduk Irian Jaya terhadap pemerintah Indonesia sejak tahun 1963. Istilah OPM menjadi lambang persatuan masyarakat Papua Barat dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan.

Separatisme adalah istilah yang merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok, bahkan komunitas yang mempunyai tujuan untuk memutuskan hubungan atau memisahkan diri dari komunitas sebelumnya. Dalam artian yang lebih luas, separatis merujuk pada upaya untuk memisahkan diri dari negara untuk mendirikan negara independen atau bangsa yang bebas dari ikatan nasional dengan negara sebelum bangsa itu merdeka. Orang-orang yang ikut serta dalam gerakan separatisme biasa disebut sebagai kaum separatis. Dalam sejarah Indonesia, negara ini sering kali mengalami aksi separatisme dari beberapa komunitas, suku, dan agama. Mereka melakukan aksi separatisme semata-mata agar dapat mewujudkan keyakinan dan kepentingan mereka. Faktanya, salah satu tujuan dari aksi ini adalah untuk meruntuhkan hukum pemerintahan yang hak dan mengalihkannya kepada pemerintahan yang baru sesuai dengan kepentingan mereka. Bahkan gerakan Organisasi Papua Merdeka telah mencari dukungan dari sampai ke luar negeri sejak tahun 1951, yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan persenjataan dan dukungan politik.

Pada masa kemerdekaan, aksi separatisme sering kali bermunculan akibat kekecewaan kepada perlakuan maupun kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil terhadap kelompok maupun komunitas tertentu, seperti hal nya yang dilakukan oleh Aceh, Maluku, Madiun, Timor Timur, Papua dan lain-lain. Walaupun gerakan separatisme sudah banyak yang telah diatasi, namun hingga saat ini gerakan separatisme masih ada yang belum teratas. Tulisan ini dibuat untuk dijadikan sebagai bahan kajian terhadap penyebab munculnya gerakan separatisme di Indonesia khususnya di Papua yang hingga saat ini masih terus beroperasi dan belum bisa diatasi oleh negaral. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana tindakan pemerintah dalam menangani gerakan tersebut.

Metode penelitian

Artikel dibuat dengan menggunakan metode kualitatif literature review pendekatan deskriptif-analisis yaitu dengan mengumpulkan data yang digunakan sebagai bahan teliti dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal maupun sumber-sumber lainnya yang berisi tentang proses pergerakan separatisme di Indonesia, pengebab, hingga aksi separatisme di Papua yang terus beroperasi hingga sekarang. Topik yang diangkat dalam tulisan ini adalah tentang aksi OPM atau yang kerap kali di sebut dengan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Mulai dari sejarah, faktor yang mendorong munculnya gerakan OPM, dan bagaimana reaksi pemerintah dalam melakukan aksi pencegahan terhadap gerakan separatisme ini tidak muncul lagi.

Pembahasan

Gerakan Separatisme di Indonesia

Dalam ranah hukum pidana, gerakan separatisme termasuk dalam kategori kejahatan yang mengancam keamanan Negara sebagaimana telah disebutkan dalam KUHP Pasal 106 tentang makar terhadap wilayah Negara. Pada KUHP Pasal 106 berbunyi “makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah Negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”. Sejarah gerakan separatisme di Indonesia mulai muncul sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-20 muncul gerakan separatisme yang cukup terkenal yaitu gerakan Aceh Merdeka. Berawal dari aksi kolonial Belanda yang dianggap merampas hak-hak rakyat Aceh kemudian menimbulkan rasa ketidakpuasan yang berakibat pada kemunculan gerakan separatisme oleh rakyat Aceh.

Pada tahun 1945 pasca Indonesia merdeka, pemberontakan yang disebut dengan separatisme ini masih saja bermunculan di beberapa daerah. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno memimpin gerakan Trikora yang dibuat untuk diluncurkan dan merebut Irian Barat dari genggaman Belanda, yang pada akhirnya gerakan Trikora ini sukses dalam menjalankan misinya dan Irian Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963. Gerakan separatisme yang masih berlangsung hingga saat ini adalah Gerakan Papua Merdeka yang dipimpin oleh OPM. OPM ini mulai menjalankan aksinya dalam upaya memisahkan diri dari negara induk sejak awal tahun 1960-an dan berlangsung hingga saat ini. Gerakan OPM masih belum bisa diredam oleh pemerintah meskipun sudah dilakukan upaya untuk mengatasi gerakan yang kontroversial ini melalui dialog dan pembangunan daerah.

Selama beberapa dekade gerakan OPM ini membuat keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut porak poranda yang mengakibatkan banyak kerugian. Mereka telah banyak melakukan kegaduhan di daerahnya sendiri, mulai dari aksi kekerasan dan konflik antara kelompok OPM dan pemerintah, bahkan antara OPM dan masyarakat setempat yang kerap kali mengakibatkan kerusakan infrastruktur bahkan berakibat pada jatuhnya korban jiwa. Bahkan juga sering ditemukan kasus dimana kelompok OPM ini dengan sengaja merusak proyek-proyek pembangunan di wilayah mereka sendiri, mulai dari jaringan listrik dan pipa gas. Kelompok OPM ini juga mempunyai potensi untuk melakukan aksi terorisme dengan menggunakan senjata dan bahan peledak.

Dalam literatur sejarah, kerap kali mengaitkan aksi separatisme di Indonesia dengan kebudayaan dan politik. Perbedaan bahasa dan adat istiadat antar berbagai daerah di Indonesia termasuk salah satu faktor kebudayaan yang kerap kali di sebutkan. Sementara faktor politik yang mendorong terjadinya aksi separatisme di Indonesia adalah kekecewaan rakyat terhadap pemerintah karena mereka menganggap bahwa pemerintah tidak memperhatikan dan mendahulukan kepentingan daerah. Reaksi pemerintah dalam menangani persoalan separatisme di Indonesia adalah dengan melakukan berbagai upaya seperti pengakuan terhadap keberagaman, pembangunan daerah, dan dialog dengan pihak-pihak yang terlibat. Upaya ini telah membantu mengurangi intensitas dan dampak dari gerakan tersebut meskipun gerakan separatisme masih terus muncul hingga sekarang. Sebelum mengangkat topik

pembahasan tentang faktor-faktor yang memicu munculnya gerakan separatisme di Papua, disini akan membahas tentang penyebab munculnya gerakan separatisme di Indonesia terlebih dahulu. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan munculnya gerakan separatisme:

Pertama, kesenjangan ekonomi antara wilayah yang lebih maju dan yang kurang maju merupakan salah satu faktor yang memicu munculnya gerakan separatisme. Masyarakat di daerah yang kurang berkembang kerap kali menghadapi perlakuan yang tidak adil seperti keterbatasan dalam memperoleh kesempatan kerja, sehingga menimbulkan kekecewaan dan keinginan untuk memisahkan diri dari negara induk. Kedua, konflik identitas yang mencakup identitas etnis, budaya, dan agama juga termasuk salah satu faktor yang mendorong munculnya gerakan separatisme. Hal tersebut terjadi karena suatu kelompok atau komunitas tertentu merasa tidak dihargai dan tidak diakui oleh masyarakat dan politik secara nasional. Ketiga, faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya gerakan separatisme, yakni ketidakpuasan terhadap pemerintah seperti pembangunan infrastruktur yang tidak merata antar wilayah, kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan sosial lainnya yang juga menjadi ketidakpuasan tersebut.

Keempat, propaganda yang menyebar melalui media sosial maupun media lainnya yang dilakukan oleh kelompok separatisme untuk mempengaruhi publik sehingga mereka memperoleh dukungan agar memperkuat mereka dalam melakukan aksi separatisme atau aksi perjuangan untuk memisahkan diri dari negara induk. Kelima, semua bentuk intervensi asing termasuk dukungan penyediaan senjata, keuangan, atau pelatihan militer, hal tersebut dapat memperkuat kelompok separatisme dan memperburuk situasi kemanan nasional.

Penyebab Terjadinya Separatisme di Papua

Gerakan Papua Merdeka muncul bukan tanpa sebab, bermula pada awal tahun 1950 yang merupakan akibat dari campur tangan kolonial Belanda yang memicu lahirnya gerakan separatisme ini. Pada tahun 1950 Belanda meningkatkan anggaran untuk pembangunan ekonomi dan pendidikan di Irian Barat, yang awalnya US\$ 4,3 juta pada tahun 1950 kemudian pada tahun 1962 meningkat drastis menjadi US\$ 28 juta. Dengan cepat pemerintah kolonial Belanda membangun struktur ekonomi dan administratif, termasuk juga Dewan New Guinea (Nieuw Guinea Raad) sebagai sebuah quasi-parlemen pada tanggal 5 april 1961. Untuk mendorong rencana politiknya, Belanda mengadakan pertemuan komite yang bertujuan untuk mendukung simbol-simbol seperti bendera bintang kejora, lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", lambang negara, dan nama negara. Langkah-langkah yang dilakukan Belanda terhadap Papua ini bermaksud untuk menjadikan Papua sebagai negara boneka dan memisahkan Papua dari negara induk seperti parasit didalam sebuah organ yang menyerang pemilik tubuh dari dalam. Dapat disimpulkan bahwa gerakan Papua Merdeka yang kini dilancarkan oleh OPM dan peristiwa yang terkait di Papua dianggap sebagai hasil dari pengaruh pendidikan yang diberikan oleh Belanda yang sewaktu-waktu bisa memuncak menjadi konflik.

Munculnya Organisasi Papua Merdeka dilatarbelakangi oleh pengaruh pemerintah Belanda di Irian Jaya pada masa pemerintahan Residen J.P. van Eechoud. Hal tersebut

ditandai dengan lahirnya para elit Papua terdidik yang bersikap pro-Papua. Termasuk rasa kecewa masyarakat Irian Jaya terhadap Pemerintah Indonesia yang mana pemerintahan Indonesia mempunyai kepentingan sendiri, yang dalam membantu rakyat Irian Jaya bukan karena rasa kemanusiaan, namun karena kepentingan ekonomi semata.

Dalam rujukan yang lain menjelaskan bahwa sejarah separatisme yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh sulitnya menyelesaikan isu terkait gerakan tersebut secara definitif. Dalam keseluruhannya, gerakan separatisme di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga kesatuan wilayah dan persatuan nasional. Akar dari gerakan separatisme ini adalah perjuangan panjang dalam melawan penjajahan kolonial Belanda untuk mendapatkan kemerdekaan. Walaupun sudah dilakukan upaya dalam menangani masalah separatisme di Indonesia, namun pada kenyataannya masih saja ada beberapa gerakan separatisme yang masih aktif dan terus melakukan aksi perjuangannya untuk mencapai tujuannya dengan menghalalkan segala cara, seperti melakukan kekerasan bahkan melakukan aksi pembunuhan.

OPM muncul karena pada masa itu Papua mengalami situasi buruk sehingga berakibat pada munculnya berbagai macam pemberontakan. Akibat dari pembangunan infrastruktur di Papua yang terabaikan, karena lebih mengutamakan Timor Timur yang pada saat itu sedang bermasalah sehingga menimbulkan kecemburuhan sosial yang luar biasa di kalangan intelektual di Papua, termasuk salah satu penyebab munculnya pemberontakan ini. Pemanfaatan secara berlebihan terhadap sumber daya alam di wilayah Papua yang hasilnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Hingga adanya dominasi pendatang terhadap penduduk asli dan memandang sebelah mata penduduk asli dan menganggapnya sebagai warga kelas dua. Penyebab-penyebab itulah yang mengakibatkan kemarahan penduduk Papua sehingga gerakan OPM semakin membara karena keinginan mereka untuk memisahkan diri dari negara induk menjadi semakin kuat.

Warga Papua merasa kecewa terhadap pengelolaan ekonomi oleh pemerintah, karena mereka menganggap pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua telah gagal. Adanya Operasi Militer yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat guna menghentikan gerakan OPM yang justru pada kenyataannya gerakan operasi militer yang dijalankan terdapat banyak sekali kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Tak hanya itu saja, maraknya aktivitas ilegal berupa penyelundupan senjata ilegal yang diperjualbelikan kepada OPM dari Papua Nugini dan oknum TNI yang menyebabkan gerakan separatisme ini semakin menguat. Semua faktor yang telah disebutkan menjadi penyebab gerakan separatisme di Irian Jaya masih terus beroperasi hingga saat ini.

Dalam aksi perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang dilakukan oleh OPM, terdapat serangkaian aksi pemberontakan secara fisik yaitu dengan menyerang pos-pos TNI. Selain melakukan pemberontakan secara fisik, mereka juga melakukan pemerintahan secara non fisik, yaitu dengan melakukan penculikan, pengibaran bendera dengan lambang bintang kejora, dan melakukan proklamasi pemerintahan Papua Barat di Viktori. Semua aksi tersebut merupakan bentuk upaya perjuangan untuk menuntut dan mendapatkan kesetaraan, kemerdekaan hak asasi manusia, dan yang paling utama adalah menuntut keadilan. Organisasi Papua Merdeka pun terus melakukan pencarian dukungan, mulai dari dukungan sesama bangsa maupun dukungan

dari negara lain.

Peran Intelejen Dalam Menjalankan Misi Mengatasi Separatisme

Intelejen dan separatisme mempunyai keterikatan yang sangat erat dikarenakan peran intelejen sangat dibutuhkan dalam memberantas aksi separatisme dalam suatu negara. Tugas intelejen adalah mengawasi, mencari informasi, dan menganalisis kegiatan kelompok separatisme serta membuat perhitungan akan potensi konflik yang dapat terjadi. Intelejen juga berperan dibidang mengidentifikasi sumber dan penyebab terjadinya aksi separatisme, agar aksi separatisme dapat diatasi. Peran intelejen juga penting dalam membantu pemerintah memonitor gerakan separatisme dan memetakan jaringan yang terlibat dalam gerakan tersebut.

Intelejen juga memiliki peran penting sebagai pemberi saran terhadap pemerintah tentang upaya pencegahan gerakan separatisme dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi gerakan tersebut. Peran intelejen juga membantu pemerintah dalam melakukan tindakan pencegahan dan menghentikan gerakan separatisme sebelum terjadi kekerasan. Dalam persoalan separatisme yang terjadi di Indonesia, intelejen menyandang peran yang penting dalam membantu pemerintah untuk memahami memahami kondisi sosial, politik, dan ekonomi di daerah yang rentan terjadi pemberontahan terhadap pemerintah, serta membantu memantau dan memetakan kelompok-kelompok yang terlibat dalam gerakan tersebut. intelejen juga bekerjasama dengan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani gerakan separatisme, termasuk dalam menyelesaikan konflik secara damai dan mencegah tindakan kekerasan. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung dalam mengawasi situasi keamanan negara, intelejen sangat credibel dalam memberikan informasi dan analisis yang akurat dan terpercaya mengenai kelompok-kelompok yang terlibat dalam gerakan separatisme yang aktif di Indonesia. Beberapa peran intelejen dalam menjalankan misi mengatasi separatisme adalah sebagai berikut :

Pertama, memantau dan mengidentifikasi kelompok separatisme yang aktif di Indonesia, termasuk cara-cara kelompok tersebut beroperasi dan strategi yang mereka gunakan. Kedua, menganalisis perkembangan situasi keamanan terkait separatisme, termasuk tren dan pola serangan, serta mengembangkan strategi dan rencana respons terhadap ancaman tersebut. Ketiga, membuat peringatan dini dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi yang akurat, intelejen dapat memberikan peringatan dini tentang potensi serangan atau ancaman separatisme, sehingga pihak keamanan dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus pelanggaran HAM. Keempat, menyediakan dukungan intelijen kepada aparat keamanan dalam menghadapi kelompok separatisme, seperti informasi tentang lokasi dan identitas anggota kelompok, serta taktik dan strategi yang digunakan oleh kelompok tersebut. Kelima, melakukan tindakan penangkapan dengan membantu aparat keamanan dalam melakukan tindakan penyergapan terhadap anggota kelompok separatisme, termasuk mengumpulkan bukti dan informasi untuk menguatkan kasus hukum. Dalam mengambil tindakan penanganan kasus separatisme yang efektif dan efisien, maka intelijen dan aparat keamanan harus membangun hubungan kerjasama diantara keduanya. Untuk menghindari konflik dan kerugian bagi masyarakat, maka intelijens juga harus

memperhatikan aspek hukum dan hak asasi manusia setiap mengambil tindakan yang dijalankan.

Kesimpulan dan Saran

Gerakan separatisme ini merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh suatu individu, kelompok maupun komunitas tertentu yang bertujuan untuk dapat memisahkan diri dari komunitas asal, mendirikan dan membentuk komunitas dengan norma atau aturan sendiri dan tidak terikat dengan komunitas manapun. Separatisme dalam redaksi kenegaraan, adalah suatu gerakan dari suatu kelompok, wilayah atau bangsa yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara dan pemerintahan asal dengan mendirikan negara dan pemerintahan sendiri yang merdeka.

Berikut kesimpulan yang dapat saya ambil dari kejadian yang hingga saat ini masih berlangsung di negara Indonesia, yakni gerakan separatisme yang terjadi di Papua. Untuk menghentikan gerakan separatisme di Papua maka kita harus menghentikan segala sesuatu yang mendukung terjadinya gerakan Papua merdeka hingga saat ini, seperti tidak melakukan eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam yang ada di Papua sehingga warga asli tetap bisa menikmati hasil dari kekayaan alam yang dihasilkan di wilayah mereka sendiri agar mereka tidak merasa tertindas oleh pemerintah dan meredam kemarahan mereka terhadap pemerintah. Tak cukup itu saja, namun untuk meredam gerakan OPM ini juga perlu untuk merangkul warga Papua dengan tidak rasis terhadap mereka, tidak boleh ada yang membeda-bedakan antara penduduk Papua dengan penduduk manapun apalagi sampai memandang mereka sebagai warga kelas dua, semua warga Indonesia memiliki posisi dan perlindungan hukum yang sama, tidak ada warga kelas satu ataupun warga kelas dua, jika perlu bentuklah undang-undang yang mengandung larangan terhadap perilaku yang mengandung unsur rasis terhadap mereka. Memberantas pelaku penyelundupan senjata ilegal dan pelaku pelanggar HAM, jika perlu pelaku nya di hukum mati agar tidak terus menerus menimbulkan kerusakan yang merugikan banyak orang, karena lebih baik menghilangkan satu parasit dari pada harus kehilangan anggota organ yang lain akibat satu parasit.

Daftar Pustaka

- Aji w., s. B. (2019). Upaya meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses siswa melalui model pembelajaran problem based learning di kelas iv sd n tingkir tengah o2. *Jurnal basicedu*, 3(1), 47-52.
- Arsyad, A. (2013). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asrul, A. (2020). Pembelajaran Inovatif pada Pendidikan Dasar. *Jurnal Bunaya*, 137-150.
- Hasbullah. (2014). *Media Pembelajaran Matematika*. Jakarta: Savitra Collage.
- Hendriana, d. (2019). *Pembelajaran Inovatif matematika*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ramadanti, E. C. (2020). Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran IPA. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1053-1062.

- Septy, L. (2015). Pengembangan Media Komik Pada Materi Peluang Kelas VIII. *Jurnal Dedaktik Matematika*. 2 (2), 16-26.
- Suandito, B. (2017). Bukti Informal Dalam Pembelajaran Matematika. *Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(1), 13.
- Sulfemi, & W. (2019). *Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya*. Bogor: STKIP Muhammadiyah.
- Zaenal, A. (2017). Variasi Pembelajaran Matematika Di sekolah Rumah Bagi Para Homeschooler. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 36(2), 157-161.